

**DIPLOMASI PARALEL KOTA TANGERANG TERHADAP KOTA YANTAI
DALAM MENGEMBANGKAN UMKM**

Syafa Ratnadewati¹, Fuad Azmi², Windy Dermawan³

Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran

Email Korespodensi: syafa22003@mail.unpad.ac.id

Email: fuad.azmi@unpad.ac.id; windy.dermawan@unpad.ac.id

ABSTRACT

This research examines the practice of parallel diplomacy conducted by Tangerang City toward Yantai City in the context of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) development. The study is grounded in a constructivist approach in international relations, which conceptualizes diplomacy as a social process shaping identities, interests, and shared meanings among actors. Parallel diplomacy is employed to explain international engagement by subnational and non-state actors operating alongside state diplomacy without full subordination to central government authority. It is analytically distinguished from paradiplomacy through its autonomous, non-hierarchical, and network-based characteristics. The analysis is further supported by the concepts of non-state actors, city diplomacy, and economic diplomacy to capture the roles of local governments, MSMEs, and business communities. Within this framework, MSMEs are positioned as local economic actors and as strategic instruments linking local development objectives with global economic dynamics. This study adopts a qualitative case study design, utilizing in-depth interviews with key informants and analysis of official policy documents and cooperation frameworks. Data are analyzed thematically through an inductive approach, supported by source and method triangulation to ensure analytical rigor. The findings indicate that parallel diplomacy between Tangerang City and Yantai City proceeds through stages of initiation, formulation of mutual understanding via a Letter of Intent, and post-agreement implementation focused on MSMEs facilitation. Parallel diplomacy functions as a supporting instrument for MSMEs' development through network expansion, product promotion, and cross-border business learning, although its implementation remains largely mediated by the local government as facilitator. The study concludes that the effectiveness of parallel diplomacy is shaped by institutional capacity, inter-actor coordination, and alignment with local development policies, while recommending stronger direct MSMEs involvement and further theoretical development of parallel diplomacy within local-actor-based international relations studies.

Keywords: Parallel diplomacy, Tangerang City, Yantai City, MSMEs, non-state actors.

ABSTRAK

Riset ini mengkaji praktik diplomasi paralel yang dijalankan oleh Kota Tangerang terhadap Kota Yantai dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Landasan konseptual riset bertumpu pada pendekatan konstruktivisme yang memandang diplomasi sebagai proses sosial pembentuk identitas, kepentingan, dan makna bersama antaraktor. Konsep diplomasi paralel digunakan untuk menjelaskan aktivitas hubungan internasional yang melibatkan aktor subnasional dan non-negara yang berjalan sejajar dengan diplomasi negara, bersifat otonom, non-hierarkis, dan berbasis jejaring, serta dibedakan secara konseptual dari paradiplomasi. Kerangka analisis juga mencakup konsep aktor non-negara, diplomasi kota, dan diplomasi ekonomi guna memahami peran pemerintah kota, pelaku UMKM, dan komunitas bisnis. Dalam konteks ini, UMKM diposisikan sebagai aktor ekonomi lokal sekaligus instrumen strategis yang menghubungkan kepentingan pembangunan daerah dengan dinamika ekonomi global. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen resmi, yang dianalisis secara tematik dengan pendekatan induktif serta diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil riset menunjukkan bahwa

diplomasi paralel Kota Tangerang terhadap Kota Yantai berlangsung melalui tahapan inisiasi, perumusan kesepakatan dalam bentuk Letter of Intent, dan tahap pascapenandatanganan yang berfokus pada fasilitasi UMKM. Diplomasi paralel berfungsi sebagai instrumen pendukung pengembangan UMKM melalui perluasan jejaring ekonomi, promosi produk, dan pembelajaran praktik usaha lintas negara, meskipun masih didominasi oleh peran pemerintah kota sebagai fasilitator. Riset ini menyimpulkan bahwa efektivitas diplomasi paralel dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, koordinasi antaraktor, dan integrasi dengan kebijakan pembangunan daerah, serta merekomendasikan penguatan keterlibatan langsung UMKM dan pengembangan kajian diplomasi paralel dalam studi hubungan internasional berbasis aktor lokal.

Kata kunci: Diplomasi paralel, Kota Tangerang, Kota Yantai, UMKM, aktor non-negara.

PENDAHULUAN

Fenomena diplomasi paralel antara Kota Tangerang dan Kota Yantai tercermin melalui serangkaian inisiatif kerja sama yang tidak semata-mata bergantung pada kanal formal antarnegara, melainkan digerakkan oleh jejaring pelaku lokal seperti UMKM, koperasi, asosiasi bisnis, dan komunitas wirausaha. Sejak penandatanganan Letter of Intent pada 2024, hubungan kedua kota semakin intensif melalui kegiatan konkret, salah satunya pameran *ASEAN Yantai Good Product Center* di Tangerang tahun 2024 yang membuka akses langsung bagi produk lokal ke pasar Tiongkok.

Melalui diplomasi paralel ini, pelaku UMKM Tangerang dapat menjalin promosi, pertukaran teknologi, dan kolaborasi dagang dengan mitra di Yantai secara lebih fleksibel dan responsif dibandingkan dengan diplomasi formal. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa aktor lokal memiliki kapasitas strategis untuk berperan sebagai jembatan ekonomi transnasional, sekaligus memperlihatkan dimensi baru hubungan internasional yang berakar dari kebutuhan praktis masyarakat sipil. Dalam konteks hubungan antara Kota Tangerang dan Kota Yantai, pendekatan diplomasi paralel menjadi relevan. Relasi ini tidak semata-mata dijalankan oleh struktur formal pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan pelaku usaha, asosiasi perdagangan, serta komunitas UMKM yang secara aktif menjalin komunikasi, pertukaran teknologi, dan kerja sama bisnis lintas negara. Pendekatan semacam ini sejalan dengan temuan Tavares (2016), yang menyatakan bahwa "kota dan komunitas lokal semakin sering bertindak sebagai pelaku hubungan internasional melalui jaringan informal dan kolaborasi tematik yang tidak sepenuhnya dikendalikan negara" (*Paradiplomacy: Cities and States as Global Players*, hlm. 67), meskipun istilah yang digunakan Tavares tetap dalam kerangka paradiplomasi. Dengan demikian, terdapat ruang konseptual dan praksis untuk memahami bagaimana diplomasi paralel menjadi alat strategis dalam mendukung internasionalisasi sektor UMKM. Hal ini penting karena pelaku usaha lokal sering kali menghadapi keterbatasan dalam mengakses pasar global melalui jalur diplomasi negara formal. Melalui diplomasi paralel yang bersifat fleksibel dan berbasis jejaring horizontal, pelaku lokal dapat menginisiasi kerja sama internasional secara otonom dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi mikro mereka.

Sebagian besar studi mengenai UMKM pun cenderung menitikberatkan pada intervensi kebijakan nasional atau program-program institusional pemerintah. Aspek transnasional dalam pengembangan UMKM, khususnya yang bersumber dari relasi diplomatik nonpemerintah seperti diplomasi paralel, belum mendapatkan porsi kajian yang proporsional. Padahal, dalam praktiknya, banyak pelaku UMKM yang secara informal telah membangun hubungan bisnis lintas batas sebagai bagian dari strategi bertahan dan berkembang di era global.

Aktor-aktor lokal di Tangerang, termasuk koperasi, komunitas wirausaha muda, serta asosiasi perdagangan, mulai menunjukkan kapasitas diplomatik yang tangguh dengan melakukan promosi produk, menghadiri expo internasional, dan menjalin koneksi langsung dengan mitra di Yantai. Aktivitas ini merupakan manifestasi nyata dari diplomasi paralel yang tidak hanya retorik tetapi juga fungsional dan berdampak langsung. Namun demikian, praktik-praktik ini masih sering tidak terdokumentasi secara sistematis dalam kajian akademik. Sebagian besar literatur diplomasi subnasional di Indonesia cenderung mengabaikan dinamika aktor nonpemerintah dan terlalu fokus pada aspek

administratif pemerintahan lokal. Hal ini menciptakan blind spot dalam kajian hubungan internasional berbasis masyarakat.

Kesenjangan pengetahuan ini menghambat pengembangan kebijakan yang mendukung diplomasi paralel sebagai strategi pembangunan ekonomi lokal. Padahal, pengalaman lapangan menunjukkan bahwa banyak keberhasilan ekspansi UMKM ke pasar luar negeri justru dimediasi oleh jejaring sosial informal dan koneksi non-pemerintah yang dibangun melalui kerja sama kota. Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan baru yang mampu menjembatani teori hubungan internasional dengan realitas partisipasi masyarakat sipil dalam diplomasi. Konsep diplomasi berbasis jaringan multi-aktor (*network diplomacy*) yang dikemukakan oleh Hocking et al. (2012) menawarkan kerangka kerja yang relevan untuk memahami interaksi kompleks ini secara lebih menyeluruh.

Riset ini hadir untuk menjawab kekosongan epistemik tersebut dengan melakukan eksplorasi mendalam terhadap praktik diplomasi paralel berbasis masyarakat dalam konteks hubungan Tangerang dan Yantai. Fokus utamanya adalah bagaimana pelaku lokal di Tangerang menggunakan diplomasi sebagai alat untuk memperkuat daya saing UMKM dan memperluas jejaring bisnis mereka. Kontribusi dari riset ini bersifat ganda dan secara teoritis memperluas horizon kajian hubungan internasional berbasis masyarakat dan secara praktis menawarkan wawasan bagi pengembangan strategi diplomasi lokal yang responsif dan adaptif terhadap dinamika global. Dalam kerangka ini, diplomasi paralel bukan lagi sekadar pelengkap dari diplomasi formal, tetapi merupakan elemen vital dalam merancang strategi pembangunan ekonomi berbasis kemandirian komunitas dan solidaritas transnasional. Riset ini, akhirnya, bertujuan untuk memperkuat argumentasi bahwa masyarakat sipil memiliki peran strategis dalam membentuk hubungan internasional dan berkontribusi secara langsung terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

METODE

Riset ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi secara mendalam dinamika diplomasi paralel antara Kota Tangerang dan Kota Yantai dalam rangka pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pendekatan kualitatif dipilih karena fenomena yang menjadi fokus riset bersifat kompleks dan memerlukan pemahaman kontekstual yang mendalam, baik mengenai proses, motivasi, maupun dampak dari diplomasi paralel. Sebagaimana dijelaskan oleh Creswell & Creswell (2018), riset kualitatif melibatkan pengumpulan data yang luas melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, dengan tujuan untuk menginterpretasi makna yang muncul dari perspektif pelaku terkait.

Dalam rangka memperoleh data yang akurat dan valid, periset melakukan pengumpulan data melalui berbagai sumber primer yang relevan, antara lain dari Kantor Wali Kota Kota Tangerang, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang, serta Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta. Kantor Wali Kota Tangerang menjadi sumber utama untuk mendapatkan informasi kebijakan dan koordinasi yang terkait dengan pelaksanaan diplomasi paralel. Sementara itu, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah menyediakan akses terhadap dokumen dan arsip resmi yang berkaitan dengan kerja sama antara Tangerang dan Yantai, serta pengembangan UMKM di kota tersebut. Kedutaan Besar Tiongkok juga menjadi sumber penting untuk menggali perspektif dari sisi mitra internasional, khususnya peran Kota Yantai dalam kerja sama bilateral ini.

Untuk menjamin reliabilitas, periset menerapkan proses audit trail, yaitu pencatatan secara rinci terhadap seluruh proses pengumpulan dan analisis data. Dokumentasi ini mencakup catatan lapangan, transkrip wawancara, hasil pengkodean, serta catatan analitis yang digunakan dalam penyusunan tema. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses riset dapat ditelusuri dan direplikasi oleh periset lain apabila diperlukan. Moleong (2017) menyebut bahwa audit trail merupakan mekanisme utama dalam menunjukkan konsistensi proses riset kualitatif.

Lokasi riset dalam studi ini mencakup sejumlah institusi strategis yang relevan dengan dinamika diplomasi paralel Kota Tangerang terhadap Kota Yantai dalam pengembangan UMKM. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen dan informasi di Kantor Wali Kota Tangerang (Jl. Satria - Sudirman No.1, Sukaasih, Kec. Tangerang). Selain itu, riset ini juga didukung oleh studi pustaka yang

dilakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Padjadjaran (Jl. Raya Bandung-Sumedang Km21, Jatinangor, Sumedang) guna memperkuat kerangka teoretik dan metodologis riset secara komprehensif.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi paralel berlangsung melalui tiga tahap utama: (1) tahap inisiasi dan peninjauan kerja sama, (2) tahap perumusan kesepakatan melalui penandatanganan *Letter of Intent*, dan (3) tahap implementasi program kerja sama pasca-penandatanganan. Diplomasi paralel memberikan peluang bagi UMKM untuk memperluas akses pasar, meningkatkan kapasitas produksi, dan membangun jejaring internasional. Namun, implementasi masih menghadapi kendala koordinasi antarlembaga dan keberlanjutan program.

Pada tahap awal, agenda diplomasi paralel Kota Tangerang terhadap Kota Yantai diawali oleh munculnya kebutuhan internal daerah untuk memperluas jejaring kerja sama internasional yang relevan dengan agenda pembangunan ekonomi lokal. Dalam dokumen perencanaan daerah dan pernyataan para pemangku kebijakan, pengembangan UMKM diposisikan sebagai salah satu prioritas strategis Kota Tangerang, mengingat perannya dalam penyerapan tenaga kerja dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Kebutuhan ini kemudian mendorong pemerintah kota untuk mencari mitra luar negeri yang memiliki pengalaman dalam pengembangan industri kecil dan menengah, kawasan industri, serta integrasi UMKM ke dalam rantai nilai global.

Dalam konteks inilah Kota Yantai dipandang sebagai mitra potensial, mengingat posisinya sebagai kota industri dan pelabuhan di Tiongkok dengan pengalaman panjang dalam pengembangan sektor manufaktur dan UMKM berbasis ekspor. Agenda awal ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan bagian dari kecenderungan yang lebih luas dalam praktik diplomasi paralel di Indonesia, di mana pemerintah daerah semakin aktif menjajaki kerja sama luar negeri untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal. Secara teoritis, kondisi ini sejalan dengan pandangan Kuznetsov yang menyatakan bahwa diplomasi subnasional umumnya dipicu oleh kepentingan domestik daerah, terutama di bidang ekonomi dan pembangunan. Dalam kasus Kota Tangerang, dorongan internal ini menjadi landasan utama yang membentuk arah dan substansi agenda diplomasi paralel, sekaligus menentukan batasan ruang gerak pemerintah daerah dalam menjalin hubungan dengan mitra internasional.

Setelah melalui fase komunikasi intensif dan peninjauan kepentingan, diplomasi paralel Kota Tangerang terhadap Kota Yantai bergerak ke tahap perumusan kesepakatan awal yang lebih terstruktur. Tahap ini ditandai dengan upaya kedua pihak untuk merangkum hasil komunikasi sebelumnya ke dalam suatu bentuk dokumen yang dapat merepresentasikan komitmen bersama, meskipun belum bersifat mengikat. Dalam konteks ini, *Letter of Intent* dipilih sebagai instrumen utama karena dianggap mampu mengakomodasi kepentingan simbolik dan politis tanpa menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks. Perumusan *Letter of Intent* mencerminkan hasil akumulasi dari berbagai agenda yang telah berlangsung pada tahap-tahap sebelumnya. Isu pengembangan UMKM tetap menjadi narasi sentral, namun dirumuskan dalam bahasa yang umum dan normatif. *Letter of Intent* tidak memuat rincian teknis mengenai bentuk kerja sama, mekanisme implementasi, pembagian peran, maupun target waktu yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa kesepakatan yang dicapai lebih berorientasi pada kesamaan visi dan niat baik daripada pada perencanaan kebijakan yang operasional. Secara analitis, kondisi ini memperlihatkan bahwa diplomasi paralel Kota Tangerang berada pada fase konsolidasi simbolik, bukan fase implementatif.

Dari perspektif teori diplomasi paralel, penggunaan *Letter of Intent* sebagai hasil utama kerja sama sejalan dengan pandangan Duchacek yang menyatakan bahwa aktor subnasional cenderung menggunakan instrumen non-mengikat untuk menavigasi keterbatasan kewenangan mereka dalam sistem internasional. Pemerintah daerah tidak memiliki kapasitas hukum dan politik untuk membuat perjanjian internasional yang bersifat mengikat, sehingga *Letter of Intent* menjadi bentuk kompromi yang paling memungkinkan. Dalam kasus Kota Tangerang, *Letter of Intent* berfungsi sebagai alat legitimasi bahwa pemerintah daerah telah menjalankan peran internasionalnya, sekaligus sebagai penanda eksistensi hubungan dengan mitra luar negeri.

Tahap pasca-*Letter of Intent* merupakan fase krusial yang justru memperlihatkan keterbatasan diplomasi paralel Kota Tangerang terhadap Kota Yantai. Setelah dokumen *Letter of Intent* ditandatangani, tidak terdapat perkembangan signifikan yang mengarah pada implementasi kerja sama. Tidak ditemukan adanya pembentukan tim pelaksana, penyusunan rencana aksi, maupun agenda lanjutan yang secara khusus membahas realisasi kerja sama UMKM. Kondisi ini menandai berhentinya proses diplomasi paralel pada tahap kesepahaman normatif. Secara analitis, berhentinya proses ini tidak dapat dipahami sebagai kegagalan aktor semata, melainkan sebagai konsekuensi dari keterbatasan kapasitas institusional pemerintah daerah. Diplomasi paralel menuntut kesiapan administratif, sumber daya manusia, dan koordinasi lintas sektor yang kuat. Dalam praktiknya, unit kerja sama luar negeri di tingkat daerah sering kali tidak memiliki fokus dan sumber daya yang memadai untuk mengawal tindak lanjut kerja sama internasional. Lecours menegaskan bahwa tanpa kapasitas institusional yang kuat, diplomasi subnasional akan sulit berkembang ke tahap implementasi.

Selain faktor kapasitas, regulasi nasional juga menjadi pembatas utama dalam tahap pasca-*Letter of Intent*. Setiap bentuk kerja sama lanjutan yang bersifat operasional memerlukan persetujuan dan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat. Proses ini sering kali memakan waktu dan berisiko kehilangan momentum kerja sama. Akibatnya, pemerintah daerah cenderung berhenti pada tahap yang paling aman secara hukum dan administratif. Dalam konteks ini, *Letter of Intent* menjadi titik akhir yang rasional dari proses diplomasi paralel yang dijalankan.

Dari sudut pandang mitra, stagnasi pasca-*Letter of Intent* juga mencerminkan absennya sinyal kesiapan implementasi dari pihak Kota Tangerang. Dalam kerja sama antarkota lintas negara, kejelasan agenda dan kesiapan institusional menjadi faktor kunci keberlanjutan hubungan. Ketika langkah lanjutan tidak segera muncul, mitra cenderung mengambil sikap pasif. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika diplomasi paralel bersifat interaktif, sehingga stagnasi merupakan hasil dari respons kedua belah pihak.

KESIMPULAN

Temuan riset menunjukkan bahwa pelaksanaan diplomasi paralel Kota Tangerang dan Kota Yantai belum sepenuhnya berjalan optimal. Kerja sama yang terbangun masih didominasi oleh pendekatan pemerintah ke pemerintah (*government-to-government*), sementara keterlibatan langsung UMKM dalam tahapan diplomasi masih terbatas. Selain itu, keberlanjutan kerja sama masih menghadapi kendala kelembagaan, seperti belum diperbaruinya dokumen kerja sama serta belum terbangunnya mekanisme teknis yang secara konsisten menghubungkan UMKM dengan mitra luar negeri. Meskipun demikian, diplomasi paralel ini telah membuka ruang pembelajaran, memperluas jejaring, dan menjadi fondasi awal bagi penguatan UMKM Kota Tangerang di tingkat internasional.

Riset ini menunjukkan bahwa diplomasi paralel di tingkat kota belum sepenuhnya bergerak dari ranah institusional ke ranah implementatif. Oleh karena itu, kajian diplomasi paralel perlu lebih menekankan analisis tahapan pelaksanaan diplomasi, bukan hanya pada bentuk hubungan antarkota. Konsep diplomasi paralel juga perlu diperkaya dengan perspektif keterlibatan aktor ekonomi lokal, khususnya UMKM, sebagai bagian dari aktor non-negara yang berperan dalam praktik diplomasi. Dengan demikian, diplomasi paralel tidak hanya dipahami sebagai aktivitas eksternal kota, tetapi juga sebagai proses kebijakan yang terhubung langsung dengan pembangunan ekonomi lokal.

Kota Tangerang perlu memperkuat aspek kelembagaan dan keberlanjutan diplomasi paralel yang dijalankan. Pembaruan dokumen formal seperti *Letter of Intent* atau *MoU* perlu diarahkan pada program yang lebih operasional dan terukur, terutama yang secara langsung melibatkan UMKM dalam setiap tahapan diplomasi paralel. Selain itu, diperlukan mekanisme pendampingan yang lebih sistematis agar UMKM tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga mampu berperan aktif dalam proses diplomasi paralel. Untuk memastikan manfaat diplomasi paralel bagi pengembangan UMKM, diplomasi paralel perlu diintegrasikan secara lebih kuat dengan kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

REFERENSI

- Ajat Sudrajat. (2024, April 4). Pameran ASEAN Yantai Good Product Center di Tangerang Angkat Potensi UMKM Lokal. Pemerintah Kota Tangerang. <https://www.tangerangkota.go.id/berita/detail/ASEAN-Yantai-UMKM>
- Acuto, M., Morissette, M., & Tsouros, A. (2017). City diplomacy: Towards more strategic networking? Learning with WHO Healthy Cities. *Global Policy*, 8(1), 14–22. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12382>
- Affandi, R. M. T., & Sari, D. S. (2021). Paradiplomasi Provinsi Jawa Barat terhadap Provinsi Sichuan dalam menanggulangi pandemi Covid-19 di Jawa Barat. *Journal Transborders*, 5(1), 1–15.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Cirprandy Riopaldo Tambunan. (2023, June 6). Kontribusi UMKM dalam perekonomian Indonesia. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikapung/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomianindonesia.html>
- Cornago, N. (2013). Plural diplomacies: Normative predicaments and functional imperatives. Brill | Nijhoff. <https://doi.org/10.1163/9789004249554>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Darmayadi, A., & Putri, S. O. (2022). Paradiplomasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui sister province dengan Republik Bashkortostan Rusia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Hubungan Internasional*, 12(1), 45–60.
- Fitriani, E. D. (2024, April 4). Pemkot Tangerang menjalin kerja sama dengan berbagai sektor di kota di China. Pemerintah Kota Tangerang. <https://tangerangkota.go.id/berita/detail/kerjasama-kota-china>
- Kuznetsov, A. S. (2015). *Theory and practice of paradiplomacy: Subnational governments in international affairs*. Routledge.
- Lecours, A. (2008). *Political issues of paradiplomacy: Lessons from the developed world*. Netherlands Institute of International Relations Clingendael.